

FAKTOR PENGORGANISASIAN (ORGANIZING) DALAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DESA DI DESA CIHARALANG KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS

Fahrul Ali Mustofa¹, Ahmad Juliarso², Wawan Risnawan³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : fahrulciamis23@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Faktor Pengorganisasian (Organizing) Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Desa di Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yang belum optimal. Hal ini terlihat dari adanya indikator masalah yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki latar belakang atau keahlian khusus di bidang teknologi informasi, belum tersedia operator khusus yang secara profesional ditugaskan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan SID, tidak adanya program pelatihan atau bimbingan teknis yang dirancang secara terencana untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan SID, dan belum terdapat struktur organisasi yang secara resmi menetapkan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing perangkat desa dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Faktor Pengorganisasian (Organizing) Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Desa di Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis belum optimal. Dari dimensi pengorganisasian (organizing) yang dijadikan alat ukur penelitian, terdapat 2 indikator yang belum berjalan optimal yaitu adanya pengelola yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi, serta penetapan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab.

Kata Kunci : *Pengorganisasian, Pengelolaan, Sistem Informasi Desa*

PENDAHULUAN

Dalam era keterbukaan informasi dan tuntutan transparansi publik, desa sebagai ujung tombak pemerintahan dituntut untuk menjalankan fungsinya secara lebih profesional, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Salah satu inovasi yang berkembang dalam rangka

memperbaiki tata kelola pemerintahan desa adalah penerapan Sistem Informasi Desa (SID). SID berfungsi sebagai media digital yang mendukung pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data desa secara sistematis guna menunjang pelayanan publik serta perencanaan pembangunan berbasis bukti. Namun, keberhasilan penerapan SID tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan perangkat lunak semata, melainkan juga sangat ditentukan oleh bagaimana sistem tersebut dikelola secara organisatoris di tingkat desa.

Dalam pengelolaan sistem informasi, fungsi pengorganisasian memiliki peran yang sangat krusial sebagai pengatur jalannya operasional secara efisien dan terstruktur. Sistem informasi Desa diartikan sebagai suatu rangkaian/sistem (baik mekanisme, prosedur, hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumber data yang ada di komunitas (Jahja, et al. 2012:19). Tanpa pengorganisasian yang memadai, pemanfaatan teknologi informasi di desa hanya akan menjadi formalitas administratif tanpa dampak nyata. Pengorganisasian dalam konteks ini mencakup identifikasi peran perangkat desa dalam mengelola data, penunjukan operator yang kompeten, penyusunan prosedur baku pelaksanaan, serta pembentukan sistem koordinasi yang efektif antara seluruh elemen pemerintahan desa.

Kendala yang banyak dihadapi oleh desa-desa dalam pengelolaan SID umumnya bersumber dari lemahnya

aspek kelembagaan. Kurangnya tenaga yang memahami teknologi informasi, belum adanya SOP yang mengatur tata kelola SID, serta minimnya pelatihan yang berkelanjutan menjadi hambatan utama yang menyebabkan sistem informasi tidak berjalan dengan semestinya. Banyak kasus ditemukan di mana data dalam SID tidak diperbarui secara berkala, atau sistem hanya aktif ketika ada proyek atau pendampingan dari pihak luar. Fenomena ini menunjukkan bahwa aspek pengorganisasian bukan sekadar pelengkap, melainkan merupakan komponen inti yang menentukan efektivitas sistem informasi desa. Tanpa adanya perencanaan dan struktur pengelolaan yang baik, potensi SID sebagai alat transformasi pemerintahan desa tidak akan terwujud sepenuhnya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi lebih jauh bagaimana peran faktor pengorganisasian dalam pengelolaan SID di Desa Ciharalang. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap pembagian tugas, kualitas sumber daya manusia, pola koordinasi, dan efektivitas prosedur kerja dalam pengelolaan sistem informasi tersebut. Diharapkan, temuan dari studi ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual pengorganisasian SID dan menjadi masukan strategis bagi pemerintah desa serta pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kinerja kelembagaan. Pengorganisasian yang

baik tidak hanya mendorong pelayanan yang lebih cepat dan tepat sasaran, tetapi juga memperkuat kapasitas desa dalam menjawab tantangan pembangunan secara adaptif, transparan, dan partisipatif.

Desa Ciharalang memiliki beragam potensi lokal yang apabila dimanfaatkan secara tepat dan berkelanjutan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut mencakup sektor pertanian, usaha mikro, sumber daya alam, serta kekayaan budaya lokal yang bernilai ekonomi tinggi. Agar potensi ini dapat berkembang secara optimal, dibutuhkan strategi perencanaan yang terarah, partisipasi aktif masyarakat, serta dukungan teknologi informasi yang memadai. Penerapan teknologi di tingkat desa mampu menjadi katalisator dalam mempercepat penyebaran informasi, memperkuat layanan publik, dan mendukung pengelolaan pembangunan desa yang lebih efisien dan transparan. Lebih dari itu, teknologi juga membuka jalan bagi promosi produk unggulan desa ke pasar digital, memperluas jejaring kemitraan, serta memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administratif, sehingga memperkuat fondasi kemandirian desa di era digital.

Namun demikian, implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Ciharalang masih menemui berbagai hambatan yang mengakibatkan sistem

tersebut belum berfungsi secara maksimal. SID yang seharusnya menjadi sarana penting dalam mendukung tata kelola desa justru belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah desa. Indikasi lemahnya pengelolaan terlihat dari kurangnya keberlanjutan dalam pemanfaatan sistem, minimnya pembaruan data, serta tidak adanya mekanisme kerja yang mendukung integrasi SID ke dalam kegiatan administratif dan pelayanan publik. Akibatnya, potensi desa yang besar menjadi kurang terdokumentasi dan tidak terkelola secara digital, sehingga memperlambat akselerasi pembangunan dan pelayanan. Ketidaksiapan perangkat desa, kurangnya pelatihan teknis, serta belum adanya SOP yang baku turut menjadi faktor yang memperlemah peran strategis SID sebagai alat bantu dalam mendorong transformasi pemerintahan desa menuju arah yang lebih modern dan adaptif. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator permasalahan sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki latar belakang atau keahlian khusus di bidang teknologi informasi.
2. Belum tersedia operator khusus yang secara profesional ditugaskan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan SID.
3. Tidak adanya program pelatihan atau bimbingan teknis yang

- dirancang secara terencana untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan SID.
4. Belum terdapat struktur organisasi yang secara resmi menetapkan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing perangkat desa dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID)

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Faktor Pengorganisasian (Organizing) Dalam Pengelilaan Sistem Informasi Desa di Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis ?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami secara mendalam terkait Faktor Pengorganisasian (Organizing) Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Desa di Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Menurut Sugiyono, (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah “metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna.” Sumber data primer diperoleh dari 5 informan dengan menggunakan teknik purposive

sampling dan sumber data sekunder dari dokumen-dokumen. Adapun teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai Faktor Pengorganisasian (Organizing) Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Desa di Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis saat ini dapat dikatakan belum optimal. Untuk lebih jelasnya, penulis uraikan pembahasan masing-masing indikator yang dijadikan alat ukur penelitian sebagai berikut :

- a. **Adanya pengelola yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak informan, pada indikator adanya pengelola yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi diketahui bahwa pengelola SID belum menguasai secara detail, namun perangkat desa saling membantu. Hal ini dilihat dari meskipun tidak ada pengelola yang memiliki latar belakang khusus di bidang Teknologi Informasi, namun seluruh perangkat desa ikut terlibat dalam pengelolaan SID yang diharapkan memiliki kemampuan untuk mengoperasikan sistem tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis temukan di lapangan, pada indikator adanya pengelola yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi diketahui bahwa pengelola SID di Kantor Pemerintah Desa Ciharalang tidak dikhkususkan kepada satu orang. Hal ini dapat dilihat dari adanya keterlibatan seluruh perangkat Desa yang harus mampu dalam mengelola SID.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator adanya pengelola yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi diketahui belum berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari keterbatasan Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa Ciharalang yang memiliki kompetensi khusus di bidang teknologi informasi dan tidak adanya pelatihan/bimbingan teknis kepada pengelola/operator SID. Sehingga, dalam pengelolaannya hanya mengandalkan koordinasi antar perangkat desa.

Hambatan yang dihadapi dalam pengaplikasian mengenai indikator adanya pengelola yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang atau keahlian khusus di bidang teknologi informasi; sebagian besar perangkat desa tidak memiliki kemampuan teknis yang memadai, dan tidak ada operator khusus yang ditugaskan secara

profesional untuk mengelola SID. Selain itu, belum ada pelatihan atau bimbingan teknis yang direncanakan. Akibatnya, kemampuan teknis perangkat desa dalam mengelola SID masih dasar dan seadanya.

Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi yang melibatkan seluruh perangkat Desa dalam mengelola SID. Sehingga, jika ada yang kurang paham terkait SID, dapat dibantu oleh perangkat Desa yang lain. Selain itu, Pemerintah Desa Ciharalang juga mempertimbangkan kerja sama dengan pihak luar atau vendor teknologi informasi dalam hal pengembangan dan pemeliharaan sistem untuk mengatasi keterbatasan teknis.

Sebagaimana menurut Usman (2006:4) mengemukakan bahwa: "Seseorang disebut kompeten apabila telah memiliki kecakapan bekerja pada bidang tertentu, dari hal ini maka kompetensi juga diartikan sebagai suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif."

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, dapat diartikan bahwa pengelolaan SID di Kantor Pemerintah Desa Ciharalang belum sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Usman (2006:4). Hal ini dapat dilihat dari belum adanya pengelola yang memiliki kecakapan atau kualifikasi khusus di bidang teknologi informasi. Pengelolaan SID masih mengandalkan

kerja sama dan koordinasi antar perangkat desa tanpa adanya pembagian tugas yang jelas kepada pengelola/operator yang benar-benar kompeten.

b. Penetapan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak informan, pada indikator penetapan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab diketahui bahwa struktur organisasi dan kewenangan belum tertata secara formal dan sistematis. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya struktur organisasi dan Surat Keputusan (SK) resmi yang menjelaskan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam pengelolaan SID.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis temukan di lapangan, pada indikator penetapan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab diketahui bahwa pengelolaan SID di Kantor Pemerintah Desa Ciharalang masih bersifat kolektif dan fleksibel. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tugas terkait pengelolaan SID yang dilakukan dengan saling koordinasi dan kesepakatan internal antarperangkat desa saja, tanpa adanya ketentuan atau administratif yang jelas.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator adanya penetapan struktur organisasi yang menunjukkan adanya

garis kewenangan dan tanggung jawab diketahui belum berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari ketidaksungguhan dalam menetapkan garis kewenangan SID.

Hambatan yang dihadapi dalam pengaplikasian mengenai indikator penetapan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab adalah belum adanya struktur organisasi yang menetapkan secara resmi tugas, fungsi dan tanggung jawaban dari masing-masing perangkat Desa dalam Pengelolaan SID. Sehingga, pembagian tugas menjadi tidak jelas, dan hanya bergantung pada kordinasi lisan antarperangkat Desa.

Upaya yang dilakukan adalah meskipun belum ada struktur organisasi dan Surat Keputusan (SK), seluruh perangkat Desa harus terlibat dalam proses koordinasi dan pembagian tugas secara informal, sehingga pengelolaan SID akan tetap berjalan.

Sebagaimana menurut Gullick (Siagian, 2014:69) yang mengemukakan bahwa:

Suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, dapat diketahui bahwa pengelolaan SID di Kantor Pemerintah Desa Ciharalang belum sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Gullick (Siagian, 2014:69) yang menekankan pentingnya penentuan, pengelompokan, dan pengaturan aktivitas untuk mencapai tujuan melalui struktur organisasi yang jelas. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya struktur organisasi formal terkait pengelola SID yang dijelaskan dalam bentuk Surat Keputusan (SK). Sehingga dalam pengelolaannya masih dilakukan secara informal yang hanya mengandalkan koordinasi antar perangkat Desa.

c. Adanya koordinasi antar perangkat desa untuk mendukung fungsi SID

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak informan, pada indikator adanya koordinasi antar perangkat desa untuk mendukung fungsi SID diketahui bahwa koordinasi antar perangkat desa telah berjalan dengan baik dan menjadi bagian dari rutinias kerja Pemerintah Desa Ciharalang. Hal ini dapat dilihat dari adanya rapat evaluasi mingguan, yang diadakan setiap hari Kamis, dilakukan untuk berkomunikasi dan bekerja sama secara aktif antar perangkat desa untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis temukan di lapangan, pada indikator adanya koordinasi antar perangkat desa untuk mendukung fungsi SID diketahui bahwa koordinasi

telah terbentuk dengan baik dan menjadi bagian dari rutinitas Pemerintahan Desa Ciharalang. Hal ini dapat dilihat dari adanya rapat mingguan rutin untuk menilai pelaksanaan kegiatan, komunikasi antar perangkat desa secara informal dan formal, dan sikap saling membantu dan mengambil alih tugas ketika perangkat berhalangan.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator adanya koordinasi antar perangkat desa untuk mendukung fungsi SID diketahui sudah berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari seluruh perangkat desa termasuk pengelola/operator SID yang saling bekerjasama dan berkoordinasi dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis SID.

Sebagaimana menurut Handoko (2003:195) mengemukakan bahwa: “Koordinasi (*coordination*) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.”

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, dapat diketahui bahwa koordinasi antar perangkat di Kantor Pemerintah Desa Ciharalang untuk mendukung fungsi SID sudah sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Handoko (2003:195), seperti dengan melakukan rapat rutin, komunikasi yang baik antar

perangkat Desa, dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Faktor Pengorganisasian (Organizing) Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Desa di Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Faktor Pengorganisasian (Organizing) Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Desa di Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis belum optimal. Dari dimensi Pengorganisasian (Organizing) yang dijadikan alat ukur penelitian, terdapat 2 indikator yang belum berjalan dengan optimal dan ditemukan hambatan yaitu adanya pengelola yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan penetapan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab.

Adapun hambatan yang ditemukan dalam Faktor Pengorganisasian (Organizing) Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Desa di Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki latar belakang atau keahlian khusus di bidang teknologi informasi, belum tersedia operator khusus yang secara profesional ditugaskan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan

SID, tidak adanya program pelatihan atau bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan SID, serta belum terdapat struktur organisasi yang secara resmi menetapkan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing perangkat desa dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID)

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Faktor Pengorganisasian (Organizing) Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Desa di Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yaitu dengan melakukan koordinasi yang melibatkan seluruh perangkat Desa dalam mengelola SID. Sehingga, jika ada yang kurang paham terkait SID, dapat dibantu oleh perangkat Desa yang lain. Selain itu, Pemerintah Desa Ciharalang juga mempertimbangkan kerja sama dengan pihak luar atau vendor teknologi informasi dalam hal pengembangan dan pemeliharaan sistem untuk mengatasi keterbatasan teknis.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko. (2003). *Manajemen* (Edisi 2). Yogyakarta : BPFE.
Jahja, Rangoaini, et al. (2012). *Sistem Informasi Desa: Sistem Informasi dan Data untuk pembaruan desa*. Yogyakarta: Combine Resource Institution Yayasan Tifa.

Siagian. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Usman, M. U. (2006). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.